**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi
Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara
Ditinjau Dalam Uu Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara**

Oleh :

Indra Kumalasari Munthe¹

Email: indrakumalasari@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di atur dalam Pasal 2(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Undang-undang Aparatur Sipil Negara adalah undang-undang yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian secara tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil karena terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 berisi tentang sanksi pidana dan perdata terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

Corruption is stipulated in Law No. 20, 2001 concerning to Amendment to Law No. 31, 1999 about the Eradication of Corruption which is regulated in Article 2 (1). Everyone who

unlawfully enforces the act of enriching himself or a corporation that can harm the state's finances or the economy, will be sentenced to a life imprisonment or imprisonment of 4 (four) years minimally and 20 (twenty) years maximally and a fine of at least 200.000.000 Rupiahs (two hundred million rupiahs) and at most 1.000.000.000 Rupiahs (one billion rupiahs). The Civil State Apparatus Act is a law to regulate the profession for civil servants and government employees with employment agreements in governmental agencies. Dismissal as a Civil Servant results in the loss of a Civil Servant status. Disrespectful dismissal of a Civil Servant is due to corruption which is detrimental to the state's finances. Law No. 20, 2001 contains the criminal and civil sanctions to the State Civil Apparatus who commit corruption.

Keywords: Corruption, State Civil Apparatus

A. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi yang meliputi wilayah, sejumlah rakyat dan mempunyai kekuasaan berdaulat. Negara Indonesia adalah negara hukum². Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut H.M Tirtaatmidjaja Hukum adalah keseluruhan aturan atau norma yang harus diikuti dalam berbagai tindakan dan tingkah laku dalam pergaulan hidup. Bagi yang melanggar hukum akan dikenai sanksi, Denda, Kurungan, Penjara atau sanksi lainnya.³ Menurut penulis hukum merupakan bagian dari sistem yang memiliki bagian suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum dalam hal ini aturan tertulis yang tertuang dalam

¹ Dosen Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan Batu

² Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

³ www.Spengetahuan.com Diakses Tanggal 20 Maret 2017

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Selanjut dalam ayat 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴

Undang-undang Aparatur Sipil Negara adalah undang-undang yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Setelah undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan DPR Pada tanggal 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan Nomor 5. Undang-undang ini menggantikan undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.⁵

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil⁵, sedangkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan

tidak dengan hormat dikarenakan antara lain yaitu : melanggar Peraturan Disiplin Berat, sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah atau janji jabatan karena tidak setia kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah, dan di hukum penjara atau kurungan setinggi-tingginya 4 (empat) tahun berdasarkan peraturan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Tindak Pidana Korupsi terpantau paling banyak dilakukan oleh aktor Pegawai Negeri Sipil (PNS) Hal itu diketahui dari hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap vonis terdakwa Korupsi.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Diatur Dalam Undang-Undang

Dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, antara lain untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan *prinsip merit* dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara. Manajemen aparatur sipil Negara diarahkan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi

⁴Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁵<https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017

dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen⁶.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tersebut, ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. Larangan Pegawai Negeri Sipil termuat dalam pasal 4 yang mengindikasikan perilaku korupsi yaitu pada point (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, (7) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan, dan (8) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

Larangan diatas apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi disiplin. Pegawai Negeri Sipil selain ketentuan di atas tentang adanya larangan dan kewajiban, juga mempunyai hak-hak untuk digunakan seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Peraturan mengenai kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil telah dibentuk dan diberlakukan, namun tidak jarang

ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kedisiplinan tersebut.

Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur pada Pasal: (8) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

9) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.¹¹ 11) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, edisi I Cetakan V. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.13

padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.¹²⁾ Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; (b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (c) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

2. Peranan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara

Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, yang mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang

yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi⁷. Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2001, pengertian korupsi adalah setiap orang yang sengaja melawan hukum untuk melakukain perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendir atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara⁸.

Ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu (1) penyyuapan; (2) pemerasan; (3) nepotisme. Dari ketiga tipe tersebut berbeda, namun dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yan dilakukan dengan rahasia, pengkhianatan, penipuan dan juga pengabaian atas kepentingan publik⁹.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam segi ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi

⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸Jur. andi hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo. Hal. 79.

⁹Santiago. Faisal. 2014. *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi: Kajian Legal Sosiologis*. Jurnal Lex Publica. Vol 1(1): 61-62

negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup pemerintahan pusat, tetapi juga menyangkut pemerintahan daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korupsi¹⁰.

Tindak Pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan oleh orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat buruk yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani secara khusus dan serius untuk itu perlu dikembangkan peraturan khusus sehingga dapat menjangkau perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umum tidak sanggup untuk menjangkaunya¹¹.

Peranan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2001, undang-undang nomor 5 tahun 2014 pada pasal 87 ayat 4 huruf b tentang Aparatur Sipil Negara yang berisi "*PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena: (a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, (c) menjadi*

anggota atau pengurus partai politik, (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (antara lain Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)¹².

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari sesorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang

¹⁰Mien Rukmini.2010. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni. Hal.111.

¹¹Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta,: Angkasa. Hal.126

¹²Joko Prakoso. I Ketut Murtika. 1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Bina Aksara. Hal.52

yang mempunyai hubungan pribadi dengannya juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat¹³.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 2 segi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:

- (1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2)
- (2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)
- (3) Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan (Pasal 4)
- (4) Percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15)
- (5) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat 1)

Korupsi Pasif adalah sebagai berikut:

- (1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001)
- (2) Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001)
- (3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001)

Seorang PNS bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena jabatannya adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tahun 2012. Diketahui terdakwa adalah seorang PNS yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Terdakwa tidak membayarkan sejumlah uang tunjangan Profesi Guru yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 yang seharusnya dibayarkan terdakwa kepada 44 Guru sebesar Rp. 443.858.950,-. Perbuatan terdakwa ini sudah pasti merugikan negara sebesar uang yang dikorupsi karena uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang dapat dinikmati serta digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

¹³Sina La. 2008. Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsidi Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 (1): 49-50

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.00,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulanserta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 443.858.950,-.

Contoh Kasus korupsi lainnya adalah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara yaitu Supriyanta,SE.,MM dan Amiruddin Is, SE, Supriyanta telah divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) putusan ini diadili oleh ketua majelis hakim Mulyanto,SH.,MH dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada saat penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara Saudara Amiruddin Is, SE meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor.474.3/07/69- LU/2014. Nomor putusan 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk.

Pegawai Negeri Sipil lain yang diberhentikan secara tidak hormat karena kasus korupsi terkait jabatannya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/TUN/2013. Diketahui penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena salah satunya terjerat Pasal 3 UU

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terkena Pasal 9 huruf a PP 32/1979. Terdakwa keberatan/tidak terima atas tindakan tergugat selaku pimpinannya yang menerbitkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS terhadap dirinya. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat.

Dalam kaitan arah pemberantasan korupsi ke depan maka peraturan perundangan mengenai aparaturnegak hukum haruslah dilakukan harmonisasi, terutama berkaitan dengan 2 (dua) hal. Pertama, tugas dan fungsi penyelidikan/penyidikan. Semakin banyak penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi adalah semakin baik dalam tugas pemberantasan korupsi, karena satu lembaga saja tidak akan mampu untuk melakukan penyelidikan/penyidikan¹⁴. Permasalahan yang sering muncul terkait adanya beberapa instansi penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK adalah adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan penyelidikan/penyidikan, masih adanya arogansi dan sikap saling curiga antar instansi penyidik, adanya persepsi yang berbeda terhadap beberapa ketentuan peraturan perundangan, adanya perbedaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, adanya perlakuan berbeda oleh negara terkait kesejahteraan penyidik dan lain-lain, untuk itu diperlukan adanya sinergitas¹⁵.

¹⁴Supandji Hendarman. 2009. *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 56

¹⁵Ibid, Hal. 57

Kedua, tugas dan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Secara praktis pengendalian penuntutan yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda akan memunculkan disparitas tuntutan pidana karena tidak adanya pedoman tuntutan pidana yang jelas. Patokan yang digunakan selama ini hanyalah ketentuan minimal khusus dan maksimal khusus dalam setiap rumusan tindak pidana dalam UU PTPK, misalnya pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Rentang sanksi pidana tersebut demikian lebar sehingga berbagai kemungkinan tuntutan pidana bisa terjadi, belum lagi terkait dengan pengenaan pidana denda, kurungan pengganti denda dan pidana tambahan.

Salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah aspek perundang-undangan yaitu terbitnya peraturan perundangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat atau kroni penguasa negara. Kualitas peraturan perundangan-undangan yang kurang memadai, *judicial review* yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan¹⁶.

Strategi pemberantasan korupsi dapat diwujudkan dengan efektif dengan pemenuhan prasyarat sebagai berikut: (1) didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri, (2) Menyeluruh dan seimbang, (3) sesuai dengan kebutuhan, ada target dan kesinambungan, (4)

berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia, (5) terukur dan transparan serta bebas dari konflik kepentingan¹⁷.

Political will serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu menegaskan kembali *political will* pemerintah, diantaranya melalui: (1) Penyempurnaan undang-undang anti korupsi yang lebih komprehensif, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi, (2) Kontrak politik yang dibuat pejabat publik, (3) Pembuatan aturan dan kode etik PNS, (4) Pembuatan Pakta Integritas, (5) Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai)¹⁸.

Penyempurnaan undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi selain untuk menjawab dinamika dan perkembangan kualitas kasus korupsi, juga untuk menyesuaikan dengan instrumen hukum internasional. Saat ini isu korupsi tidak lagi dibatasi sekat-sekat negara, namun telah berkembang menjadi isu regional bahkan internasional. Hal ini tidak lepas dari praktek korupsi yang melibatkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara. Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi.

Tumpang tindih kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien. Strategi pemberantasan korupsi harus juga

¹⁶Sulistyo.Agustinus. 2013. *Reformasi Kepegawaian (PNS) melalui RUU Aparatur Sipil Negara*.Jurnal IASIA. Vol.1 (5): 76

¹⁷Pope. Jeremy. 2008. *Strategi memberantas Korupsi*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia

¹⁸Muzadi, H. 2004. *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Banyumedia. Hal. 80

bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan korupsi yang parsial dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Berkenaan dengan hal ini, maka strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil. Di samping itu, penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringgannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang timbul oleh perbuatan itu¹⁹.

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (antara lain Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak kejahatan itu adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan

negara, kejahatan terhadap negara dan kepala negara atau wakil kepala negara sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban negara, hak-hak negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum, berhubungan dengan itu maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.

Keberadaan produk regulasi yang diberikan negara untuk menyelamatkan keuangan negara dari perilaku korupsi sangat dituntut kepada aparat penegak hukum untuk semaksimal mungkin dapat memahami rumusan delik yang terkait dan menyebar di setiap pasal yang ada agar tepat dalam menerapkan kepada para pelaku. Selain itu juga diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang jitu dan tepat. Penerapan sanksi normatif mengenai korupsi kepada para pelakunya akan bermanfaat dan bernilai penyesalan bilamana diikuti juga beberapa strategi. Ada 3 hal yang harus dilakukan guna mengurangi sifat dan perilaku korupsi yaitu (1) menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah, (2) menaikkan moral pegawai tinggi, dan (3) legislasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

a) Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang memuat tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang mengatur tentang Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pada Pasal 8 sampai 12 sudah dijelaskan tentang hukuman yang akan diterima oleh pegawai

¹⁹Soetomo, 1987. *Hukum Kepegawaian Dalam Praktek*, Surabaya: Usaha Nasional, Hal.225.

negeri atau penyelenggara negara jika melakukan korupsi yang dapat merugikan negara.

b) Peranan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara adalah dengan pemberhentian secara tidak hormat karena korupsi adalah suatu tindak pidana untuk memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. ada 2 unsur dalam perbuatan korupsi yaitu aspek untuk memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Penyebabnya antara lain kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, kemiskinan, dan tidak adanya hukuman yang tegas. Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan dasar dari pemberhentian pegawai negeri sipil yang dikarenakan melakukan pelanggaran, tindak pidana, penyelewengan. Mengenai tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP. Dan kejahatan mengenai keamana negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP. Sehingga sesuai dengan Pasal tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan diancam hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

2. Saran

Diperlukan adanya suatu solusi untuk pemerintah dalam hal meningkatkan

kesejahteraan ASN/PNS dan membuat suatu regulasi terhadap Undang- Undang ASN/PNS tentang pemberatan sanksi pidana bagi pelaku yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan adanya sanksi administrasi berupa pemecatan ASN/PNS yang tujuannya adalah agar tercapainya efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN/PNS.

Sanksi yang tegas diberikan kepada aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 agar memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan pada saat penerimaan Pegawai Negeri Sipil perlu diadakan tes psikologis tentang korupsi untuk mengetahui tindakan para Aparatur Sipil Negara ketika mereka berada pada jabatan yang memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Bina Aksara.

Jur. andi hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo.

Mien Rukmini. 2010. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Muzadi, H. 2004. *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Banyumedia.

Pope. Jeremy. 2008. *Strategi memberantas Korupsi*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia

Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta,,: Angkasa. hal.126

Santiago. Faisal. 2014. *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi: Kajian Legal Sosiologis*. Jurnal Lex Publica. Vol 1(1): 61-62 Sina La. 2008. Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsidi Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 (1)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Huum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, edisi I Cetakan V. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soetomo, 1987. *Hukum Kepegawaian Dalam Praktek*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sulistyo. Agustinus. 2013. *Reformasi Kepegawaian (PNS) melalui RUU Aparatur Sipil Negara*. Jurnal IASIA. Vol.1 (5)

Supandji Hendarman. 2009. *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*. Semarang: Universitas Diponegoro

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

C. INTERNET

<https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 20Maret 2017

www.Spengetahuan.com Diakses Tanggal 21 Maret 2017